

EXECUTIVE SUMMARY

PANGKALAN DATA DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SUMBER DAYA AIR BIDANG IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2012



Desember, 2012



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
B A L A I I R I G A S I

Jalan Cut Meutia, Bekasi 17113, PO Box 147; Telp. : (021) 8801365, Faks.: (021) 8801345;
E-mail : kairigasil@pu.go.id & irigasi@pusair-pu.go.id



KATA PENGANTAR

Pangkalan data dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Bidang Irigasi berupa software Sistem Informasi Data Dasar Irigasi (SIDDI) yang didalamnya memuat data luasan daerah irigasi, operasi dan pemeliharaan bangunan serta saluran irigasi, Pola tanam (Rencana Tata Tanam) serta kelembagaan irigasi (P3A), sehingga data dan informasi yang ada dapat digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang irigasi.

Tujuan kegiatan ini agar terwujudnya Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Air (SIG-SDA) bidang irigasi di Pulau Jawa, 3 lokasi di Pulau Sumatera dan 1 lokasi di Kalimantan, dengan output yang akan dicapai adalah Model sistem berupa pangkalan data dan informasi Irigasi di Pulau Jawa, sebagian Sumatera dan Kalimantan.

Kami berharap semoga hasil dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan terkait dengan kondisi daerah irigasi terkini.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Masukan, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan kegiatan ini.

Bandung, Desember 2012
Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air

Ir. Bambang Hargono, Dipl.HE, M.Eng
NIP. 19540425 198012 1 002

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Luas Daerah Irigasi berdasarkan Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007, di Indonesia \pm 7.469.796 ha yang terbagi kedalam 32.808 daerah Irigasi dengan jumlah hampir 6000 daerah aliran sungai (DAS), mengingat luas dan banyaknya daerah irigasi yang ada di Indonesia maka perlu dibangun sebuah sistem untuk pengelolaan data keirigasian yang terstruktur dengan baik. Untuk itu Pusat Litbang SDA sangat memerlukan pengelolaan basis data dan sistem informasi SDA untuk melakukan pengarsipan dan diseminasi data dari berbagai sumber di pusat dan daerah, termasuk komputerasi (digitalisasi), validasi dan sebagainya.

Sistem yang dibangun tersebut tentunya harus selalu dijaga kemutakhirannya, agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan terkait dengan kondisi daerah irigasi terkini, sehingga harus selalu dilakukan *updating* sistem maupun data yang ada didalamnya.

Kegiatan ini sangat mendukung terselenggaranya sarana dan prasarana ke-PU-an terutama untuk mendukung rencana strategi BALITBANG agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan terkait dengan kondisi daerah irigasi terkini. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan kegiatan Pengelolaan basis data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air Bidang Irigasi.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pangkalan data Irigasi baik irigasi permukaan maupun irigasi mikro serta tersedianya Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Air (SIG-SDA) bidang irigasi untuk menunjang tersusunnya buku data daerah irigasi sebagai katalog irigasi.

3. Sasaran

Model Sistem pangkalan data dan sistem informasi geografis bidang irigasi

4. Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup pelaksanaan Kegiatan Pangkalan Data dan Sistem Informasi Geografis Bidang Irigasi pada tahun 2012 sebagai berikut :

1. Basis data Irigasi, meliputi kegiatan:
 - a. Validasi/updating data bidang irigasi permukaan dan irigasi mikro.
 - b. Sinkronisasi dan integrasi data/informasi irigasi dengan data yang ada di Direktorat Jenderal SDA.
 - c. *inputing* data irigasi permukaan kedalam *software* SIDDI.
2. Kodefikasi Geografis pada peta digital dan updating Sistem Informasi Geografis-Sumber Daya Air (SIG-SDA) bidang irigasi untuk Pulau Jawa.
3. Penyusunan Katalog Irigasi

Kegiatan Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air Bidang Irigasi dilaksanakan secara multiyears, lingkup kegiatan tersebut dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya hanya saja berbeda lokasi yang akan di update data irigasinya.

5. Metodologi

Pengumpulan data berupa data primer maupun sekunder, data primer dari survey lapangan dengan melakukan penelusuran jaringan di beberapa daerah irigasi untuk mendapatkan data kondisi daerah irigasi. Data sekunder berupa referensi, laporan Survey Investigasi dan Desain Rehabilitasi Partisipatif Daerah Irigasi dan laporan Pemantauan Pelaksanaan TP-OP (Tugas Pembantuan Operasi Pemeliharaan) dari BBWS/BWS maupun Dinas PSDA tingkat Provinsi/Kabupaten.

Analisa data dilakukan terhadap indikator kebutuhan data pada struktur database yang telah disusun. Keragaman bentuk data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui parameter format data yang sesuai dengan Sistem Informasi Data Dasar Irigasi (SIDDI) dan kebutuhan data layer untuk SIG-SDA dengan verifikasi dan penghitungan ulang terhadap sumber data (Skema jaringan dan skema bangunan irigasi).

Tahap analisa data dilanjutkan dengan *inputing* data ke dalam SIDDI. Selain *inputing* ke *software* SIDDI dilakukan juga *Inputing* data kebutuhan informasi SIG-SDA Bidang Irigasi melalui kodefikasi SIG-SDA pada peta geografis per-DAS.

6. Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Pangkalan Data dan Sistem Informasi Geografis Bidang Irigasi terbagi kedalam 3 subkegiatan yaitu Basis Data Irigasi, SIG-SDA Bidang Irigasi, dan Penyusunan Katalog Irigasi, subkegiatan tersebut merupakan komponen output dari model sistem pangkalan data dan SIG bidang Irigasi.

6.1 Basis data Irigasi

Pangkalan Data dan Sistem Informasi Geografis bidang Irigasi sangat ditentukan oleh keberadaan data dan updating data bidang irigasi, hasil pengumpulan data yang telah dilakukan kemudian dihitung dan dikelompokkan kedalam sub menu yang terdapat dalam Software Sistem Informasi Data Dasar Irigasi (SIDDI). Sejauh ini data yang telah dikelompokkan berdasarkan keberadaan bangunan, saluran dan sumber air irigasi. Data tersebut terlebih dahulu akan dibandingkan dengan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 .

Berdasarkan data tersebut penyusutan luasan lahan irigasi yang ada akan dianalisa apakah termasuk kedalam alih fungsi lahan irigasi. Analisa dilakukan berdasarkan data yang ada. Data disusun dalam bentuk tabel yang menyajikan luasan daerah irigasi berdasarkan Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007 dengan luasan usulan perubahan berdasarkan hasil pengumpulan data irigasi di BWS/BBWS/Balai PSDA Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum. Nilai yang didapat berupa alih fungsi lahan irigasi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk bahan revisi Kepmen tersebut.

6.1.1. BBWS Sumatera VIII.

Adapun beberapa catatan yang dapat dijadikan masukan perubahan kepada direktorat Irigasi dan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Luas Daerah Irigasi kewenangan pusat yang yang menjadi tanggung jawab pengelolaan oleh BWS Sumatera II adalah 151.958 ha.
2. Dari total luasan Daerah Irigasi Kewenangan pusat (>3000 ha) terdapat selisih luasan sebesar 39.494 ha.
3. Daerah Irigasi yang tidak sesuai dengan di lapangan yaitu Daerah Irigasi Komering dengan Luas 64.854 ha, berdasarkan Kepmen

390/KPTS/M/2007 Daerah Irigasi Komerling/Way Komerling mempunyai luas 67.828 ha yang merupakan daerah irigasi lintas provinsi Sumatera Selatan (Kab. OKU Timur) dan Lampung (Kab. Way Kanan). Selain itu, didalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 menyebutkan bahwa terdapat DI Komerling Utara seluas 18.077 ha dan DI Komerling Selatan seluas 18443 ha, dimana Daerah Irigasi tersebut dilapangan merupakan satu daerah irigasi seluas 64.854 ha.

6.1.2. BWS Sumatera II.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat data luasan daerah irigasi yang telah ditetapkan dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Adapun beberapa catatan yang dapat dijadikan masukan perubahan kepada direktorat Irigasi dan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data lapangan di BWS Sumatera II bahwa daerah irigasi kewenangan pusat yang dikelola oleh BWS Sumatera II adalah 87.242 ha.
2. Dari total luasan Daerah Irigasi Kewenangan pusat (>3000 ha) di BWS Sumatera II terdapat selisih luasan sebesar 32.743 ha.
3. Selisih Luasan Tersebut merupakan data daerah irigasi yang tidak tercantum dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007, yaitu DI Sei Ular seluas 18.500 ha dan DI Batang Angkola seluas 7.200 Ha.
4. Terdapat 1 Daerah Irigasi yang tertera dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 namun tidak tertera dalam data daerah irigasi di lapangan (Kewenangan BWS Sumatera II) yaitu DI Perkotaan dengan Luas 3.457.

Berdasarkan 4 catatan tersebut maka perlu penyesuaian terhadap Nama dan Luasan Daerah Irigasi sebagai bahan masukan dalam revisi Nama dan Luas Daerah Irigasi.

6.1.3. BWS Sumatera I.

Evaluasi dilakukan terhadap data luasan Daerah Irigasi berdasarkan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan data yang ada di lapangan. Berdasarkan data luasan daerah irigasi yang disajikan dalam tabel 5.19

dapat dievaluasi bahwa data luasan Daerah Irigasi yang telah ditetapkan dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 terdapat beberapa Daerah Irigasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan (pengelolaan BWS Sumatera I). Adapun beberapa catatan yang dapat dijadikan masukan perubahan kepada direktorat Irigasi dan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data lapangan di BWS Sumatera I bahwa daerah irigasi kewenangan pusat yang dikelola oleh BWS Sumatera I adalah 158.258 ha.
2. Dari total luasan Daerah Irigasi Kewenangan pusat (>3000 ha) di BWS Sumatera I terdapat selisih luasan sebesar 37.340 ha.
3. Selisih Luasan Tersebut merupakan data daerah irigasi yang tidak tercantum dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007, yaitu DI Krueng Tiro dengan Luas 6.924 ha, DI Gunung Puding seluas 5.250 ha, DI Lhok Guci seluas 18.542 ha, DI Tamiang seluas 5.000 ha dan DI Peureulak dengan luas 5.000 ha, data tersebut menjadi catatan perubahan untuk usulan dalam perubahan data Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007.
4. Adanya penambahan luas areal daerah irigasi Jambo Aye Langkahan seluas 113 ha, DI Alue Ubay seluas 3 ha, DI Krueng Pase seluas 131 ha, DI Susoh seluas 173 ha, DI Lawe Alas/Kuta Cane Lama dari 5.425 ha menjadi 15.000 ha (9.575 ha).
5. Adanya Alih Fungsi lahan (pengurangan data luasan DI) pada DI Datar Diana dari 3.200 ha menjadi 1.700 ha (1.500 ha), DI Jeuram dari 12.446 menjadi 7.499 ha (4.967 ha), DI Baroraya dari 19.118 ha menjadi 12.194 ha (6924 ha).

Berdasarkan 5 catatan tersebut maka perlu penyesuaian terhadap Nama dan Luasan Daerah Irigasi sebagai bahan masukan dalam revisi Nama dan Luas Daerah Irigasi.

6.1.4. BWS Sumatera V.

Evaluasi dilakukan terhadap data luasan Daerah Irigasi berdasarkan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan data yang ada di lapangan . Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat Data luasan Daerah Irigasi yang tidak sesuai antara Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan

kondisi yang ada di lapangan. Adapun beberapa catatan yang dapat dijadikan masukan perubahan kepada direktorat Irigasi dan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Dari total luasan Daerah Irigasi Kewenangan pusat (>3000 ha) di BWS Sumatera V bahwa terdapat selisih luasan sebesar 5616 Ha.
2. Terdapat 1 Daerah Irigasi yang tidak tercantum dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 namun daerah irigasi tersebut di lapangan menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu DI Kawasan Ubo seluas 5.616 Ha.

Berdasarkan 2 catatan tersebut maka perlu penyesuaian terhadap Nama dan Luasan Daerah Irigasi sebagai bahan masukan dalam revisi Nama dan Luas Daerah Irigasi dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007.

6.1.5. BWS Sumatera VII.

Evaluasi dilakukan terhadap data luasan Daerah Irigasi berdasarkan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan data yang ada di BWS Sumatera VII. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat Data luasan Daerah Irigasi yang tidak sesuai antara Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan kondisi yang ada di lapangan. Adapun beberapa catatan yang dapat dijadikan masukan perubahan kepada Direktorat Irigasi dan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Dari total luasan Daerah Irigasi Kewenangan pusat (>3000 ha) terdapat selisih luasan antara Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan kondisi yang ada di lapangan sebesar 2468 Ha.
2. Selisih luasan tersebut dikarenakan terdapat 2 Daerah Irigasi yang luasannya tidak sesuai antara Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan daerah irigasi di lapangan, daerah irigasi tersebut mengalami pengembangan atau penambahan luasan yaitu DI Muko-Muko Kanan, di Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 mempunyai luas 6.600 ha mengalami pengembangan luas sebesar 5.379 ha menjadi seluas 11.979 ha dan Daerah Irigasi Air Lais Kuro Tidur pada Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 seluas 5936 ha, padahal luasan sebenarnya di lapangan adalah 7.053 ha mengalami penambahan luas sebesar 1117 ha.

3. Terdapat 1 daerah irigasi yang mengalami alih fungsi lahan 4.010 ha dari 7.060 ha pada Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007, sedangkan kondisi yang ada di lapangan seluas 3.050 ha.

Berdasarkan 3 catatan tersebut maka perlu penyesuaian terhadap Nama dan Luasan Daerah Irigasi sebagai bahan masukan dalam revisi Nama dan Luas Daerah Irigasi dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007.

6.1.6. BWS Kalimantan II.

Evaluasi dilakukan terhadap data luasan Daerah Irigasi berdasarkan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan data yang ada di BWS Kalimantan II. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat Data luasan Daerah Irigasi yang tidak sesuai antara Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan kondisi yang ada di lapangan. Adapun beberapa catatan yang dapat dijadikan masukan perubahan kepada direktorat Irigasi dan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Dari total luasan Daerah Irigasi Kewenangan pusat (>3000 ha) terdapat selisih luasan antara Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan kondisi yang ada di lapangan sebesar 17.471 Ha.
2. Selisih luasan daerah irigasi antara Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan kondisi yang ada di lapangan tersebut diantaranya adalah adanya 3 daerah irigasi yang ada di lapangan namun tidak tercantum dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 yaitu DI Alabio seluas 6.000 ha DI Amandit seluas 5.472 ha dan DI Batang Alai seluas 8.000 ha.
3. Perubahan luasan yang disebabkan alih fungsi (penurunan luasan lahan irigasi) seluas 2.001 ha yaitu daerah irigasi Tapin yang mempunyai luas 3.471 ha di lapangan sedangkan yang tercantum dalam Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007 adalah 5.472 ha.

Berdasarkan 3 catatan tersebut maka perlu penyesuaian terhadap Nama dan Luasan Daerah Irigasi sebagai bahan masukan dalam revisi Nama dan Luas Daerah Irigasi dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007.

6.1.7. BWS Kalimantan I.

Daerah Irigasi kewenangan pusat yang menjadi tanggungjawab pengelolaan BWS Kalimantan I adalah 5 Daerah Irigasi. Kelima Daerah Irigasi tersebut merupakan daerah irigasi baru yang merupakan pengembangan daerah irigasi menjadi 1 sistem jaringan irigasi.

Daerah Irigasi Sanggau Ledo yang terletak di Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kawasan yang diperuntukkan untuk pengembangan areal/lahan pertanian, dimana luas potensial yang ada diperkirakan mencapai 6500 Ha. Sebagian lahan telah dibuat jaringan irigasinya secara teknis seluas 1.451 Ha. Sumber air berasal dari Sungai Pisak, Sungai Tebudak, Sungai Tahu dan Sungai Ngadan anak sungai dari Sungai Tanggi (anak sungai Sambas).

Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibukotanya Putussibau dialiri oleh banyak sungai. Salah satu sungai adalah Sungai Kalis yang bermuara di Sungai Mandai yang merupakan anak Sungai Kapuas. Jika jaringan irigasi teknis dikembangkan, maka Kabupaten Kapuas Hulu akan menjadi lumbung beras. Pada TA 2010 Balai Wilayah Sungai Kalimantan I telah mengkonsultasikan DI Nangakalis kepada Direktorat Jenderal SDA. TA 2011 BWS Kalimantan I melakukan pekerjaan Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) dan TA 2012 akan melakukan detail desain DI Nangakalis.

DI Sebangki seluas 3000 ha terletak di Kabupaten Landak, dengan memanfaatkan Sungai Landak yang bermuara di Sungai Kapuas. DI Mentebah seluas 3.037 ha terletak di Kabupaten Kapuas Hulu dengan memanfaatkan Sungai Mentebah sebagai sumber airnya. DI Sambe seluas 3000 ha juga akan dikembangkan menjadi daerah irigasi baru yang terletak di Kabupaten Landak dengan memanfaatkan sumber air dari Hulu Kapuas.

Daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh BWS Kalimantan I adalah 5 Daerah Irigasi dengan total luas 32.694 Ha yang belum tercantum dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007. Dengan demikian, data tersebut menjadi catatan yang dapat dijadikan masukan perubahan dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 kepada direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA.

6.1.8. BWS Kalimantan III.

Daerah Irigasi kewenangan pusat yang menjadi tanggungjawab pengelolaan BWS Kalimantan II adalah 4 Daerah Irigasi dengan total luas 13.160 ha.

Daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh BWS Kalimantan II adalah 4 Daerah Irigasi dengan total luas 13.160 Ha yang belum tercantum dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007. Dengan demikian, data tersebut menjadi catatan yang dapat dijadikan masukan perubahan dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 kepada direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA.

6.1.9. BBWS Pompengan Jeneberang.

Evaluasi dilakukan terhadap data luasan Daerah Irigasi berdasarkan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan data yang ada di lapangan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat Data luasan Daerah Irigasi yang tidak sesuai antara Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan kondisi yang ada di lapangan. Adapun beberapa catatan yang dapat dijadikan masukan perubahan kepada direktorat Irigasi dan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Total Alih fungsi lahan irigasi di Sulawesi Selatan berdasarkan data pada Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan data luasan irigasi di Lapangan adalah 27.149 ha.
2. Jumlah Daerah Irigasi di Sulawesi Selatan berdasarkan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 adalah 42 Daerah Irigasi dengan total luas 374.464, sedangkan di lapangan sejumlah 33 daerah irigasi dengan luas 347.315 ha.
3. Terdapat 10 Daerah Irigasi dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 yang tidak sesuai dengan lapangan yaitu DI Kalaera Kiri (3.875 ha), DI Kalaera Kanan I (6.615 ha), DI Wajo (7000 ha), DI Kalaera Kanan II (4.226 ha), DI Baranti (5.037 ha), DI Bajo (7.000), DI Ponre-Ponre (4.411 ha), DI Pinrang (42.931), DI Bontomanai (3.830 ha), DI Sindenrang (3.400 ha), DI KALAena Kiri/Kanan (16.945).

4. Terdapat 3 Daerah Irigasi yang belum tercantum dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 yaitu DI Boya (10.000 ha) dan DI Walimpong (26.000 ha) dan DI Kanjiro (3.100 ha).
5. Usulan perubahan luasan pada 14 daerah irigasi di Sulawesi Selatan yaitu DI Kampili dengan luas 10.545 ha menjadi 10.454 ha, DI Kelara/Karalloe dengan luas 7.199 menjadi 7.185 ha, DI Kalola Kolasi dengan Luas 5.405 menjadi 5.736, DI Lawo dengan luas 3.600 ha menjadi 3.500, DI Awo dengan Luas 5.254 ha menjadi 5.324 ha, DI Palakka dengan Luas 4.633 ha menjadi 4.663 ha, DI Sanrego dengan luas 9.457 ha menjadi 6.615 ha, DI Bungadidi Lauwo Sanggeni dengan luas 3.500 ha menjadi 4.900 ha, DI Lamasi dengan Luas 10.306 ha menjadi 10.303 ha, DI Padang Sappa dengan Luas 6.450 ha menjadi 6.500 ha, DI Padang Sappa dengan Luas 12.588 ha menjadi 5.500 ha, DI Sadang Sidrap dengan Luas 15.195 ha menjadi 62.203 ha.

Berdasarkan 3 catatan tersebut maka perlu penyesuaian terhadap Nama dan Luasan Daerah Irigasi sebagai bahan masukan dalam revisi Nama dan Luas Daerah Irigasi dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007.

6.1.10. BWS Nusa Tenggara II.

Evaluasi dilakukan terhadap data luasan Daerah Irigasi berdasarkan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan data yang ada di BWS Nusa Tenggara Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat Data luasan Daerah Irigasi yang tidak sesuai antara Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 dengan kondisi yang ada di lapangan, terdapat beberapa catatan yang dapat dijadikan masukan perubahan kepada direktorat Irigasi dan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Penambahan luas areal baru pada DI Mamak dan Batu Bulan dengan total luas penambahan luasan total 2.153 ha, dari 40.774 ha menjadi 42.927 ha.
2. Perubahan Luasan Daerah irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan kondisi luasan di lapangan untuk revisi Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 adalah; DI Batu Bulan dengan luas semula 4.955 ha menjadi 5.576 ha dan DI Mamak dengan luas semula 3.884 ha menjadi 5.416 ha.

Berdasarkan 2 catatan tersebut maka perlu penyesuaian terhadap Nama dan Luasan Daerah Irigasi sebagai bahan masukan dalam revisi Nama dan Luas Daerah Irigasi dalam Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007.

6.2 SIG-SDA Bidang Irigasi

Berdasarkan kodefikasi yang telah dilakukan, jumlah daerah irigasi berdasarkan data spasial pada pekerjaan ini sejumlah 2214 daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota, provinsi serta kewenangan pusat.

6.3 Katalog Irigasi

Isi dari katalog irigasi menggambarkan data-data yang statis dan menunjukkan data inventarisasi sumber air, bangunan dan saluran irigasi serta kelembagaannya, Daerah Irigasi Cihea menjadi contoh Katalog Irigasi.

Katalog irigasi yang disusun adalah Katalog Irigasi Cihea yang terletak di Kabupaten Cianjur. Penyusunan Katalog Irigasi Cihea kemudian diasistensikan kepada pengelola daerah irigasi Cihea yaitu Balai PSDA Wilayah III Ciranjang kabupaten Cianjur Jawa Barat. Informasi yang terdapat dalam katalog irigasi mencakup lokasi, luas dan letak geografis, pola dan intensitas tanam, sumber air, dan pengelolaan kelembagaan.

Data dalam Katalog irigasi diperoleh dengan melakukan penelusuran jaringan irigasi Cihea di Kabupaten Ciajur, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran jaringan tersebut diperoleh data koordinat bangun sekaligus dapat digunakan untuk penginventarisasian jumlah bangunan. Jumlah bangunan yang diperoleh dari hasil penelusuran jaringan juga digunakan untuk melakukan penyesuaian skema bangunan irigasi Daerah Irigasi Cihea. Ada beberapa bangunan yang sudah tidak sesuai lagi dengan skema awal daerah irigasi Cihea, terdapat beberapa penambahan bangunan bagi/bagi sadap/bagi yang baru dan belum masuk dalam skema bangunan irigasi yang lama, terdapat pula bangunan yang sudah hilang yaitu tempat pemandian hewan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian skema bangunan irigasi yang baru.

Kesimpulan

1. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah model sistem pangkalan data dan sistem informasi geografis sumber daya air bidang irigasi yang terbagi kedalam 3 komponen output yaitu buku data irigasi, buku SIG Bidang Irigasi dan Buku Katalog irigasi.

2. BASIS DATA IRIGASI

- a. Perubahan/Evaluasi untuk total data berdasarkan data lapangan jika dibandingkan dengan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 untuk wilayah sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi adalah 1.067.772 ha dari 893.776 ha dengan jumlah Daerah Irigasi 147 DI dari 133 DI.
- b. Luasan penerapan irigasi mikro di Indonesia hasil inventarisasi data oleh balai irigasi adalah 9.066,15 Ha yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

3. SIG-SDA Bidang Irigasi

Jumlah daerah irigasi berdasarkan data spasial dan telah melalui proses kodefikasi geografis bidang irigasi pada pelaksanaan pekerjaan SIG bidang irigasi Pulau Jawa adalah 2214 daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota, provinsi serta kewenangan pusat.

4. Katalog Irigasi

Isi dari katalog irigasi menggambarkan data-data yang statis dan menunjukkan data inventarisasi sumber air, bangunan dan saluran irigasi serta kelembagaannya, Daerah Irigasi Cihea menjadi contoh Katalog Irigasi.